

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 2
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021
Waktu : 10.10 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020;
2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021;
3. RKA K/L Tahun 2022;
4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan
5. Isu-isu Aktual lainnya.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 46 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Dr. Muhammad Yusuf. S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. TB Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);

6. Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Laksma TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Lily Apriliya Pregiwati (Kuasa Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
10. Hari Maryadi (Kuasa Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
11. Fatah Setiawan Topobroto Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Persero);
12. Sigit Muhartono Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
13. Arif Haendra Kuasa Direktur Utama PT Garam (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu Aktual lainnya, dibuka pukul 10.10 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 per-31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 1) Realisasi Pendapatan LRA bersih sebesar **Rp857.300.830.347,00** (delapan ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) atau mencapai 78,49% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp1.092.183.687.500,00** (satu triliun sembilan puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 2) Realisasi Belanja bersih sebesar **Rp4.809.863.593.815,00** (empat triliun delapan ratus sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau mencapai 91,27% dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar **Rp5.269.869.632.000,00** (lima triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

b. Neraca

- 1) Nilai Aset sebesar **Rp26.309.426.260.695,00** (dua puluh enam triliun tiga ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- 2) Nilai Kewajiban sebesar **Rp19.289.276.464,00** (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah). dan
- 3) Nilai Ekuitas sebesar **Rp26.290.136.984.231,00**. (dua puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

c. Laporan Operasional (LO)

- 1) Pendapatan-LO sebesar **Rp846.241.947.633,00** (delapan ratus empat puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- 2) Beban sebesar **Rp6.115.579.824.381,00** (enam triliun seratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
Sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp5.269.337.876.748,00** (lima triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas akhir sebesar **Rp26.290.136.984.231,00** (dua puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 berdasarkan *Online Monitoring System* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 19 Agustus 2021 sebesar **Rp2.675.528.373.590,00** (dua triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar

lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 56,36%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen melakukan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2021 agar lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 91,27%, sehingga dapat meraih opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp6.115.967.397.000,00** (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan anggaran tambahan Tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp8.043.438.587.000,00** (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 sebesar **Rp1.200.000.000.000,00** (satu triliun dua ratus miliar rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK Provinsi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - b. DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah).Selanjutnya Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran DAK Tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp1.800.000.000.000,00** (satu triliun delapan ratus miliar rupiah).

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) bantuan Pemerintah tahun 2022 di akhir tahun 2021 (T-1) dan segera melakukan sosialisasi bimbingan teknis (bimtek) kepada masyarakat kelautan perikanan bersama Anggota Komisi IV DPR RI, agar pada triwulan pertama tahun 2022 bantuan Pemerintah dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memperbaiki pola pengadaan barang dan jasanya (PBJ) tahun 2022, misalnya dengan memakai konsep *e-catalog*, agar tercipta efisiensi biaya dan efisiensi waktu sehingga program pemulihan ekonomi masyarakat kelautan perikanan di masa pandemi Covid-19 dapat tersalurkan dengan cepat dan tidak terkesan lambat.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memprioritaskan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) kelompok masyarakat yang sudah lolos verifikasi bantuan Pemerintah usulan aspirasi di tahun 2021, kemudian terkena *refocusing* anggaran agar dapat didahulukan diimplementasikan di tahun 2022 sehingga mampu memperbaiki tingkat kepercayaan publik.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna menyelesaikan keluhan nelayan di perairan Pulau Bangka, terutama Perairan Air Kantung, Perairan Pantai Matras, Perairan Pantai Muntok, dan perairan lainnya akibat adanya kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) yang dilakukan oleh Mitra Kerja PT Timah Tbk. serta perusahaan lainnya, mengingat terbukti berdampak merusak lingkungan ekosistem perairan dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat/nelayan sekitar.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna memanfaatkan bangkai kapal MV Viking Lagos di perairan Kabupaten Pangandaran agar ditarik ke pantai sebagai wisata edukasi masyarakat dan pendapatan daerah.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pendangkalan sedimentasi muara sungai di beberapa daerah Indonesia agar akses keluar masuk kapal nelayan tradisional ke pelabuhan perikanan dapat berjalan dengan lancar, termasuk perbaikan infrastruktur pelabuhan perikananannya dimulai pada Tahun Anggaran 2022 secara bertahap.

11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi bantuan Pemerintah kepada petambak garam rakyat dengan teknologi terkini, guna meningkatkan mutu dan kualitas agar dapat diserap oleh industri sebagai bahan baku dan bahan penolong lainnya untuk mengurangi impor garam.
12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangkitkan aset infrastruktur yang mangkrak di beberapa daerah di Indonesia agar menciptakan bisnis industri kelautan dan perikanan yang mampu menyejahterakan rakyat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan secara keberlanjutan.
13. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan status kepegawaian bagi peneliti beserta status aset di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan merujuk kepada terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
14. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi adanya pungutan biaya seragam di Sekolah Politeknik binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan jika ada pelanggaran oleh oknum tertentu maka perlu ditindak oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
15. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* terkait komoditas pergaraman dan komoditas udang bersama Komisi IV DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.35 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Sakti Wahyu Trenggono

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151